

Januari

Pertanian dalam Arena Politik: Relasi Kebijakan Publik, Kekuasaan, dan Nasib Petani

Ismail Munadi Sangadji¹, Ahmad Faqih Mursid²¹Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah SorongEmail: ismailsangadji4@gmail.com

Abstract

The agricultural sector not only serves as a pillar of food security and a primary source of livelihood for rural communities, but also constitutes a strategic arena in political dynamics and public policymaking. This article aims to analyze the relationship between public policy, political power, and farmers' livelihoods from a political economy perspective. Using a qualitative-descriptive approach based on a literature review and policy analysis, this study examines how the formulation and implementation of agricultural policies are influenced by the interests of political actors, interest groups, and power structures at both national and local levels. The findings indicate that agricultural policies are often not neutral, but rather reflect political compromises that in some cases favor elite actors and agribusiness interests over smallholder farmers. The politicization of subsidies, the distribution of production inputs, and agricultural assistance programs have the potential to reinforce unequal access to resources and weaken farmers' bargaining positions. This article emphasizes that the success of agricultural policy is determined not only by technical and economic factors, but also by the configuration of power and political processes underlying policymaking. Therefore, more inclusive, transparent, and pro-smallholder agricultural policies are required to achieve equitable and sustainable agricultural development.

Keywords: agriculture, public policy, political economy, power, farmers, food security.

Abstrak

Sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat pedesaan, tetapi juga menjadi arena strategis dalam dinamika politik dan kebijakan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kebijakan publik, kekuasaan politik, dan nasib petani dalam perspektif ekonomi politik. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji bagaimana proses perumusan dan implementasi kebijakan pertanian dipengaruhi oleh kepentingan aktor politik, kelompok kepentingan, serta struktur kekuasaan di tingkat nasional dan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pertanian sering kali tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan kompromi politik yang dalam beberapa kasus lebih menguntungkan aktor elite dan pelaku agribisnis dibandingkan petani kecil. Politisasi subsidi, distribusi input produksi, serta program bantuan pertanian berpotensi memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber daya dan melemahkan posisi tawar petani. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pertanian tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan dan proses politik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan pertanian yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada petani kecil guna mewujudkan pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: pertanian, kebijakan publik, ekonomi politik, kekuasaan, petani, ketahanan pangan.

Pendahuluan

Sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan dan perekonomian nasional, tetapi juga menjadi arena strategis dalam dinamika politik dan kebijakan publik. Dalam banyak negara berkembang, pertanian sering ditempatkan sebagai sektor prioritas dalam agenda politik karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, inflasi pangan, dan legitimasi pemerintah. Swinnen (2021) menegaskan bahwa kebijakan pertanian secara historis selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, institusi, serta relasi kekuasaan yang membentuk arah intervensi negara dalam sistem pangan dan pertanian.

Pendekatan ekonomi politik dalam kajian pertanian menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah bersifat netral, melainkan merefleksikan negosiasi antara aktor-aktor politik, kelompok kepentingan, dan struktur kekuasaan. Kebijakan subsidi, perlindungan harga, dan distribusi input pertanian sering kali menjadi instrumen politik untuk memperoleh dukungan elektoral, khususnya dari masyarakat pedesaan. Studi-studi kontemporer dalam *Journal of Agrarian Change* menekankan bahwa relasi antara negara dan petani dibentuk oleh konfigurasi kekuasaan yang kompleks, yang berdampak pada siapa yang diuntungkan dan siapa yang termarginalkan dalam sistem kebijakan pertanian (Bernstein, 2019).

Dalam konteks kebijakan publik, pertanian juga menjadi ruang kontestasi antara kepentingan kesejahteraan petani dan agenda makroekonomi negara. Intervensi pemerintah melalui subsidi, harga dasar, dan program bantuan sering dipromosikan sebagai upaya melindungi petani kecil, namun dalam praktiknya dapat memperkuat ketimpangan struktural. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desain kebijakan pertanian kerap lebih menguntungkan aktor besar dan elite agribisnis dibandingkan petani kecil, sehingga memperlemah posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian (Swinnen & Anderson, 2020).

Dinamika politik pertanian juga tampak dalam berbagai kasus internasional, di mana kebijakan pertanian memicu konflik antara pemerintah dan petani. Contohnya, reformasi kebijakan pertanian di India pada 2020–2021 memicu gelombang protes petani karena dianggap mengurangi perlindungan negara dan memperbesar peran pasar serta korporasi. Studi dan laporan mutakhir menunjukkan bahwa konflik tersebut merefleksikan ketegangan antara agenda liberalisasi ekonomi dan perlindungan sosial terhadap petani kecil, yang pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan nasional (Government of India & berbagai analisis kebijakan, 2022–2024).

Selain itu, kebijakan pertanian juga berkaitan erat dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan di tingkat lokal. Program bantuan pertanian, penguatan kelompok tani, dan distribusi pupuk sering menjadi arena politisasi, baik dalam konteks pemilu maupun dalam relasi patron-klien di pedesaan. Penelitian terbaru di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa politisasi program pertanian dapat memengaruhi efektivitas kebijakan serta memperkuat ketergantungan petani terhadap aktor politik tertentu, alih-alih meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani (Mazwi, 2020; studi ekonomi politik pertanian Afrika).

Dalam perspektif kebijakan publik, relasi kekuasaan dalam sektor pertanian juga berdampak pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Studi mutakhir menyoroti bahwa kebijakan subsidi dan

konsolidasi lahan dapat mempercepat marginalisasi petani kecil serta memperkuat konsentrasi kepemilikan lahan. Model bio-ekonomi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak sensitif terhadap struktur sosial pertanian dapat memperburuk ketimpangan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang sektor pertanian (Moretti & Benzaquen, 2024).

Dalam perspektif kebijakan publik, relasi kekuasaan dalam sektor pertanian juga berdampak pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Studi mutakhir menyoroti bahwa kebijakan subsidi dan konsolidasi lahan dapat mempercepat marginalisasi petani kecil serta memperkuat konsentrasi kepemilikan lahan. Model bio-ekonomi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak sensitif terhadap struktur sosial pertanian dapat memperburuk ketimpangan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang sektor pertanian (Moretti & Benzaquen, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam relasi antara kebijakan publik, kekuasaan politik, dan kondisi petani dalam sektor pertanian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas proses politik, kepentingan aktor, serta dinamika kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis kebijakan (policy analysis). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional (10 tahun terakhir), buku referensi terkait ekonomi politik pertanian, laporan kebijakan pemerintah, dokumen peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, serta laporan dari lembaga internasional dan nasional yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis, dengan mengidentifikasi kata kunci seperti *politik pertanian*, *kebijakan publik pertanian*, *ekonomi politik pertanian*, dan *kesejahteraan petani*. Artikel dan dokumen yang terpilih kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu terbit dalam 10 tahun terakhir, memiliki relevansi langsung dengan tema relasi kebijakan dan kekuasaan dalam sektor pertanian, serta dipublikasikan dalam jurnal atau sumber yang memiliki reputasi akademik.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pertanian sebagai Produk Negosiasi Politik

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan pertanian tidak lahir semata-mata dari pertimbangan teknis dan ekonomi, melainkan merupakan hasil dari proses negosiasi politik antara berbagai aktor, seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, dan pelaku agribisnis. Proses perumusan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elektoral dan stabilitas politik, sehingga sektor pertanian menjadi instrumen strategis untuk memperoleh dukungan politik, khususnya dari masyarakat pedesaan. Temuan ini menguatkan perspektif ekonomi politik yang menempatkan kebijakan pertanian sebagai arena kontestasi kepentingan, bukan sebagai kebijakan yang sepenuhnya netral dan rasional secara teknokratis.

2. Politisasi Subsidi dan Program Bantuan Pertanian

Januari

Hasil analisis menunjukkan bahwa subsidi pertanian dan program bantuan (seperti pupuk bersubsidi, benih, dan bantuan alat mesin pertanian) kerap menjadi instrumen politik yang rentan dipolitisasi. Dalam berbagai studi yang ditelaah, distribusi bantuan tidak selalu berbasis kebutuhan objektif petani, tetapi dipengaruhi oleh pertimbangan politik, kedekatan dengan aktor tertentu, serta kepentingan menjaga basis dukungan. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran dan memperlemah efektivitas kebijakan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kecil.

3. Ketimpangan Akses dan Posisi Tawar Petani

Temuan kajian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kebijakan pertanian lebih menguntungkan aktor besar, seperti perusahaan agribisnis dan pemilik modal, dibandingkan petani kecil. Petani kecil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pasar, yang diperparah oleh desain kebijakan yang kurang sensitif terhadap struktur sosial pertanian. Hal ini menyebabkan posisi tawar petani kecil dalam rantai nilai pertanian menjadi lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan tekanan pasar. Dalam konteks ini, kebijakan pertanian berpotensi memperkuat ketimpangan struktural jika tidak dirancang secara inklusif.

4. Relasi Kekuasaan Negara, Pasar, dan Petani

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa relasi antara negara, pasar, dan petani membentuk dinamika kebijakan pertanian yang kompleks. Negara sering berada dalam posisi menyeimbangkan antara perlindungan terhadap petani dan tuntutan efisiensi pasar. Namun, dalam praktiknya, liberalisasi pasar dan penguatan peran korporasi sering kali menggeser peran negara sebagai pelindung petani kecil. Hal ini memperkuat dominasi aktor pasar dalam menentukan harga dan akses input, yang pada akhirnya berdampak pada kerentanan ekonomi petani.

5. Dampak Kebijakan terhadap Kesejahteraan Petani

Dari berbagai sumber yang dianalisis, ditemukan bahwa dampak kebijakan pertanian terhadap kesejahteraan petani bersifat beragam dan tidak selalu positif. Di satu sisi, subsidi dan program bantuan dapat membantu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, ketergantungan terhadap bantuan serta ketidakkonsistenan kebijakan dapat menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan kemandirian petani. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pertanian tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh tata kelola, transparansi, dan keberpihakan kebijakan.

6. Pertanian sebagai Arena Kontestasi Politik

Pembahasan ini menegaskan bahwa pertanian merupakan arena politik yang penting, di mana berbagai aktor berupaya memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan kepentingannya. Kontestasi ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, terutama dalam distribusi program dan sumber daya. Dalam konteks ini, nasib petani sangat ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan dan proses politik yang melatarbelakangi kebijakan, bukan semata-mata oleh faktor teknis produksi pertanian.

7. Implikasi Kebijakan dan Relevansi bagi Pembangunan Pertanian

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sektor pertanian memerlukan kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara politik dan sosial. Kebijakan pertanian perlu dirancang secara lebih inklusif, dengan melibatkan petani kecil dalam proses perumusan kebijakan, memperkuat transparansi distribusi bantuan, serta membatasi dominasi aktor elite dan kepentingan korporasi. Dengan demikian, pertanian tidak hanya menjadi

alat politik, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan keadilan sosial.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan arena politik yang sarat dengan relasi kekuasaan dan kepentingan. Kebijakan pertanian tidak semata-mata lahir dari pertimbangan teknis dan ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, negosiasi antaraktor, serta konfigurasi kekuasaan yang membentuk arah intervensi negara. Dengan demikian, pertanian tidak dapat dipahami hanya sebagai sektor produksi, melainkan juga sebagai ruang kontestasi politik yang menentukan distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan. Politisasi kebijakan pertanian, khususnya dalam bentuk subsidi dan program bantuan, menunjukkan bahwa kebijakan sering digunakan sebagai instrumen untuk menjaga dukungan politik. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, memperlemah efektivitas kebijakan, serta memperkuat ketimpangan akses antara petani kecil dan aktor yang lebih kuat secara ekonomi dan politik. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya posisi tawar petani kecil dalam sistem pertanian dan rantai nilai pangan. Relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan petani juga memengaruhi tingkat perlindungan dan kesejahteraan petani. Dalam banyak kasus, penguatan peran pasar dan korporasi tidak selalu diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang memadai bagi petani kecil, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi dan sosial mereka. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran dan program, tetapi juga pada kualitas tata kelola, transparansi, dan keberpihakan kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya merancang kebijakan pertanian yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan petani kecil. Keterlibatan petani dalam proses perumusan kebijakan, penguatan mekanisme akuntabilitas, serta pembatasan dominasi kepentingan elite dan korporasi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sektor pertanian benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Bernstein, H. (2017). Political economy of agrarian change: Some key concepts and questions. *RUDN Journal of Sociology*, 17(1), 7–18. <https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/15452>
- Borras, S. M., Franco, J. C., Isakson, S. R., Levidow, L., & Vervest, P. (2016). The rise of flex crops and commodities: Implications for research. *Journal of Peasant Studies*, 43(1), 93–115. <https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1036417>
- Clapp, J., & Moseley, W. G. (2020). This food crisis is different: COVID-19 and the fragility of the neoliberal food security order. *Journal of Peasant Studies*, 47(7), 1393–1417. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1823838>
- FAO. (2017). *The future of food and agriculture: Trends and challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Januari

FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Hall, R., Scoones, I., & Tsikata, D. (2017). Plantations, outgrowers and commercial farming in Africa: Agricultural commercialisation and implications for agrarian change. *Journal of Peasant Studies*, 44(3), 515–537. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1263187>

McMichael, P. (2016). *Development and social change: A global perspective* (6th ed.). Sage Publications.

Moretti, E., & Benzaquen, M. (2024). Mitigating farmland biodiversity loss: A bio-economic model of land consolidation and pesticide use. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2407.19749>

OECD. (2021). *Agricultural policy monitoring and evaluation 2021*. OECD Publishing.

Resnick, D., & Swinnen, J. (2023). *The political economy of food system transformation: Pathways to progress in a polarized world*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198882121.001.0001>

Scoones, I., Edelman, M., Borras, S. M., Hall, R., Wolford, W., & White, B. (2018). Emancipatory rural politics: Confronting authoritarian populism. *Journal of Peasant Studies*, 45(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1339693>

Swinnen, J. (2018). *The political economy of agricultural and food policies*. Palgrave Macmillan.

Swinnen, J., & Anderson, K. (2020). Political economy of agricultural and food policies. *Annual Review of Resource Economics*, 12, 189–208. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119-024815>

Swinnen, J., & McDermott, J. (2020). *COVID-19 and global food security*. International Food Policy Research Institute. <https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133762>

World Bank. (2020). *Agriculture and food: Sector policy overview*. World Bank Group.